

**ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 - 2025**

YULIUS WAWENZA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

ABSTRAK

YULIUS WAWENZA. Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021-2025. Dibimbing oleh MARIATY dan ARDIYANSYAH PURNAMA.

Selama periode tahun 2021-2025 telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan luas dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Pulang Pisau sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik *overlay* dan analisis peta serta data sekunder, yang terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup tahap persiapan, tahap pengolahan dan pemrosesan data awal, dan tahap analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 menjadi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11578 tanggal 10 Desember 2025. Selama kurun waktu 5 (lima tahun), telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan yang berdampak pada berkurangnya luas dan berubahnya fungsi kawasan hutan sebesar ± 210.7857 Ha. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pelepasan kawasan hutan untuk Perkebunan Sawit Besar (PBS), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Pelepasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi Tidak Produktif (HPKTP) dari Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk tujuan pembangunan. Faktor ini mempengaruhi terjadinya perubahan luas dan fungsi kawasan hutan yaitu pelepasan kawasan hutan dalam rangka pembangunan perkebunan, pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan pembangunan sarana pendukung transportasi.

Kata kunci: Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi, Sistem Informasi Geografi (SIG), Kabupaten Pulang Pisau.

ABSTRACT

YULIUS WAWENZA. *Analysis of Changes in Forest Area Function in Pulang Pisau Regency from 2021–2025. Supervised by MARIATY, S.Hut., M.P. and ARDIYANSYAH PURNAMA, S.Hut., M.Si.*

During the 2021–2025 period, changes have occurred in the function of forest areas in Pulang Pisau Regency. This study aims to analyze the changes in the area and function of forest areas in Pulang Pisau Regency from 2021 to 2025 using a Geographic Information System (GIS). The research employed a descriptive method, utilizing overlay techniques and map analysis on secondary data. The methodology consisted of several stages, including preparation, initial data processing and management, and data analysis. The findings revealed that changes

in forest area function were based on the transition from Ministerial Decree No. SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 to Minister of Forestry Decree Number 11578, dated December 10, 2025. Over the five-year period, there was a change in forest area function, resulting in a reduction of area and a shift in function covering approximately $\pm 210,785.7$ hectares. This was primarily attributed to the release of forest areas for Large-Scale Oil Palm Plantations (PBS), the Settlement of Land Tenure in the Context of Forest Area Arrangement (PPTPKH), and the release of Unproductive Convertible Production Forests (HPKTP) from Production Forest to Other Use Areas (APL) for development purposes. These factors, including the release of forest areas for plantation development, settlements, office infrastructure, and transportation support facilities, significantly influenced the changes in the area and function of the forest area.

Keywords: Forest Area, Change in Function, Geographic Information System (GIS), Pulang Pisau Regency.

**ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 - 2025**

**YULIUS WAWENZA
NIM. 22.61.126744**

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada
Program Studi Kehutanan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN
2026**

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2026 sampai dengan Juni 2026, dengan judul Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 - 2025.

Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Mariiaty, S.Hut., M.P selaku dosen pembimbing pertama
2. Bapak Ardiyansyah Purnama, S.Hut., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua
3. Bapak Dr. Nanang Hanafi, S.Hut., M.P. dan Dr. Ir. Sari Marlina, S.Hut., M.Si. selaku dosen penguji skripsi
4. Bapak Dr. Nanang Hanafi, S.Hut., M.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Beni Iskandar, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Program Studi Kehutanan
6. Keluarga Penulis: Istriku Depi Natalia, S.Hut., M.P., terima kasih atas semua dukungannya. Anak-anakku terkasih, Lionel, Tristan dan Kenzo terima kasih atas semangat dan dukungannya.
7. Teman-teman satu angkatan/satu bimbingan tahun 2022 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UMPR

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Palangka Raya, Januari 2026

Yulius Wawenza

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Definisi Hutan	3
2.2 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.....	3
2.3 Penyebab Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	4
2.4 Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	4
BAB III METODE.....	4
3.1 Waktu dan Tempat	4
3.2 Bahan, Alat dan Perangkat Lunak/ <i>Software</i>	5
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Gambaran Penetapan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Pulang Pisau	7
4.1.1 Kondisi Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021	7
4.1.2 Kondisi Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025	9
4.1.3 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 – 2025	11
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Pulang Pisau	13

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	16
5.1 Simpulan	16
5.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	9
RIWAYAT HIDUP.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Pulang Pisau	7
Tabel 2	Distribusi dan Luas Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau	9
Tabel 3.	Perubahan Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Pulang Pisau	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian	4
Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021	8
Gambar 3. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025	10
Gambar 4. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Pulang Pisau	11
Gambar 5. Persentase Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau.....	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (Pasal 1 Ayat 3) tentang Kehutanan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Selanjutnya, Ifrani (2015) mengemukakan bahwa tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status, dan fungsi kawasan hutan yaitu: 1) menjaga dan mengamankan keberadaan dan kebutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional, dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional, dan global; dan 2) terwujudnya kepastian hukum atas kawasan hutan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan/hutan dalam rangka pembangunan nasional, sektoral, dan daerah.

Seiring berjalannya waktu telah terjadi perubahan fungsi dan luas Kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan tuntutan perkembangan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan yang luas. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat dan apabila ketersediaan lahan terbatas, maka dapat terjadi proses alih fungsi lahan seperti pembukaan areal hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan areal perkebunan masyarakat (Teja, 2015; Prihatin, 2015).

Pada tahun 2021, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah memiliki luas kawasan hutan sekitar $\pm 1.173.852$ Ha (BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, 2025). Angka ini mencakup berbagai fungsi seperti KSA/KPA/TN/SM/TAHURA, hutan lindung (HL), hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), areal penggunaan lain (APL) dan perairan. Beberapa tahun kemudian terjadi perubahan fungsi kawasan, sehingga luasan kawasan hutan berkurang menjadi ± 963.067 Ha pada tahun 2025. Berdasarkan perubahan tersebut, maka dengan demikian luas wilayah Administratif dan Kawasan Hutan Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan luasan (pengurangan). Perubahan data dan informasi ini disebabkan oleh adanya perubahan pada fungsi kawasan perairan yang dialih fungsikan untuk kawasan lainnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya tahun 2025 telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan karena adanya proses pelepasan resmi melalui Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) Kabupaten Pulang Pisau oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Program Hutan Produksi yang dapat diKonversi Tidak Produktif (HPK-TP) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sebagian lagi merupakan Pelepasan Kawasan Hutan, penyelarasan fakta lapangan dengan aturan, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah secara terukur. Tulisan ini bertujuan menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 – 2025 dengan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG), agar batas hutan dan non-hutan menjadi lebih jelas, mengurangi konflik lahan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 – 2025 dengan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG), agar batas hutan dan non hutan menjadi lebih jelas, mengurangi konflik lahan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

1.3 Manfaat

Dampak positif (kegunaan) hasil skripsi bagi bidang iptek, pembangunan, dan masyarakat. Manfaat karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Acuan Pengambilan Keputusan: Memberikan dasar faktual bagi pemerintah (seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Bappeda) untuk mengevaluasi dan merancang tata ruang wilayah.
2. Evaluasi Regulasi: Menjadi alat ukur untuk meninjau efektivitas peraturan terkait perizinan alih fungsi lahan agar sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Basis Data Ilmiah: Menghasilkan literatur dan metodologi analisis (seperti penggunaan *Geographic Information System* / SIG) untuk memantau perubahan fungsi kawasan hutan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.